

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi *stunting* yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara yang berpendapatan menengah lainnya, balita yang mengalami *stunting* akan mengakibatkan memiliki tingkat kecerdasan yang kurang maksimal anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan dapat beresiko menurunnya produktivitas dimasa depan. Secara luas *stunting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi memperluas ketimpangan dan meningkatkan kemiskinan. Kondisi ini jika tidak diatasi dapat berpengaruh pada pembangunan nasional yang ada di Indonesia.

Stunting sebagai bentuk kegagalan tumbuh kembang pada anak yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama dimulai dari masa kehamilan sampai 24 bulan. Kurangnya gizi pada saat masa tumbuh kembang anak usia dini dapat menghambat perkembangan fisik, perkembangan mental anak, menurunnya imunitas tubuh sehingga mengakibatkan anak gampang sakit dan bahkan menimbulkan kematian. *Stunting* memberikan informasi mengenai gangguan pertumbuhan linear dalam jangka panjang (WHO, 2012). Sebagian besar, *stunting* digunakan sebagai indikator untuk mengukur status gizi dalam kehidupan masyarakat. Jika angka *stunting* pada balita disuatu daerah tinggi. Maka sudah dipastikan bahwa didaerah tersebut mengalami masalah pembangunan seperti ketersediaan air bersih, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan lain-lain (Siswati, 2018).

Pada tahun 2019 prevalensi *stunting* Indonesia mencapai 27,67%, pada tahun 2020 prevalensi *stunting* mencapai 26,92 sedangkan pada tahun 2021 prevalensi *stunting* 24,4% (<https://stunting.go.id>). Walaupun setiap tahunnya mengalami penurunan akan tetapi Indonesia jumlahnya masih jauh dari ambang batas *stunting* yang ditetapkan WHO sebanyak 20%. Penurunan prevalensi *stunting* pada balita adalah agenda utama Pemerintah RI, Sekretariat Wakil Presiden mengkoordinasikan upaya percepatan Penurunan *stunting* agar konvergen baik dalam perencanaan, pelaksanaan, termasuk pemantauan dan evaluasi di berbagai tingkat pemerintahan termasuk desa. Setwapres mendorong keterlibatan semua pihak dalam percepatan penurunan *stunting* agar prevalensi turun hingga 14% pada 2024 nanti (<https://stunting.go.id>).

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dinyatakan bahwa prevalensi balita mengalami *stunting* di Indonesia pada tahun 2019 cenderung menurun dibandingkan 2018, yaitu dari 30,8% menjadi 27,7% namun angka ini tetapi tinggi. Untuk diketahui bahwa pada tahun 2007, angka *stunting* di Indonesia mencapai 36,8%, pada 2010 mencapai 34,6%, 2013 mencapai 37,2% dan pada tahun 2018 berjumlah 30,8%. Sebagai perbandingan di Amerika pada tahun 2010 angka *stunting* hanya mencapai 2,1%, untuk Jepang menjadi 7,1% pada tahun 2014 sedangkan Malaysia, Thailand dan Singapura masing-masing 17%, 16%, 4% (kemenkes.go.id, 2020) dalam (Dafriadi, 2021).

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Kepulauan Riau, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2020 jumlah balita di Kabupaten Bintan sebanyak 7775 anak yang tercatat di 15 puskesmas dan

balita yang mengalami *stunting* di Kabupaten Bintan sebanyak 871 anak dengan prevalensi 11,20%. Sedangkan tahun 2021 jumlah balita di Kabupaten Bintan sebanyak 10. 946 anak yang tercatat di 15 puskesmas dan balita yang mengalami *stunting* sebanyak 570 anak dengan prevalensi *stunting* 5,21%.

Kelurahan Gunung Lengkuas dan Kelurahan Sungai Lekop merupakan kelurahan yang berada dalam layanan kesehatan UPTD Puskesmas Sei Lekop dengan jumlah balita di tahun 2020 sebanyak 794 orang dengan prevalensi *stunting* sebanyak 2,39%, sedangkan jumlah balita di tahun 2021 sebanyak 358 orang dengan prevalensi *stunting* sebanyak 15,36%. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa telah terjadinya peningkatan yang sangat signifikan dalam 1 tahun.

Pencegahan dan penanggulangan *stunting* membutuhkan upaya yang bersifat holistic dan saling terintegrasi. Upaya perbaikan gizi merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegritas, dan berkesinambungan untuk meningkatkan dan memelihara status gizi pada masyarakat. Penurunan kasus *stunting* diperlukan kolaborasi antar sektor kesehatan maupun non kesehatan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan menetapkan 8 aksi konvergensi antara lain aksi analisis situasi, pemetaan program kegiatan, rembuk *stunting*, Perbup kewenangan desa, Pembinaan KPM, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data *stunting* serta review kinerja tahunan.

Kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Indonesia antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2017 tentang Sebuah Kebijakan Strategis Gizi dan Pangan yang menegaskan tentang penyusunan

suatu Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkualitas dalam pembangunan pangan dan gizi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 merupakan salah satu strategi dalam *Scaling Up Nutrition* (SUN) dengan melibatkan berbagai sektor yang harus disikapi dengan koordinasi yang kuat baik di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Diseminasi informasi dan advokasi kepada stakeholder dan pemangku kepentingan lain diberbagai lintas sektor pada tingkatan yang sama dan perlu dilakukan upaya pelatihan dan edukasi untuk jajaran 4 esponsibi agar mampu menjelaskan dan melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Strategi nasional percepatan penurunan *stunting* di Indonesia melalui langkah-langkah berupa 5 pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun dimandatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Adapun kelima pilar tersebut adalah komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah; komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat dan daerah; ketahanan pangan dan gizi; serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang mampu meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Selanjutnya, intervensi

penting penguatan 1000 HPK yang menjadi bagian dari budaya di kehidupan sosial masyarakat, melakukan kursus singkat dalam pengetahuan dan pendidikan kepada ibu sebelum kehamilan atau sebelum menjadi pengantin (calon pengantin) sebagai bekal ibu dalam kehamilan untuk menjaga tumbuh kembang kognitif janin yang dimulai dari trimester pertama dalam pembentukannya (Aryastami, 2017).

Pemerintah telah meluncurkan sebuah Rencana Aksi Nasional Penanganan *Stunting* pada bulan Agustus 2017 yang harus menekankan pada kegiatan konvergensi di tingkat desa, daerah, dan nasional untuk mengutamakan dengan kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) hingga dengan usia 6 tahun. Intervensi Gizi Spesifik yang ditujukan kepada ibu hamil dan anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan kontribusi sebesar 30% penurunan *stunting* pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Sedangkan Intervensi Gizi Sensitif ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan kontribusi sebesar 70% terhadap penurunan angka *stunting* dengan sasaran masyarakat umum dan tidak khusus terhadap ibu hamil dan balita pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2017) dalam (Dafriadi, 2021). Kebijakan dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting* juga tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Upaya Keluarga.

Dalam upaya penurunan *stunting*, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menetapkan Desa Lokus *Stunting*, memasukan isu *stunting* serta menyediakan

anggaran penanganan *stunting*. Namun, dalam penurunan *stunting* dengan mengidentifikasi masalah *stunting* masih mengalami keterbatasan antara lain masih belum maksimalnya kelas parenting, kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi ibu hamil dan anak usia 0-60 bulan dan rendahnya sanitasi yang berada di lingkungan masyarakat. Untuk itu, solusi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan melakukan Edukasi Kelas Ibu Hamil, pemberian vitamin pada ibu nifas, pemberian suplemen penambah darah untuk remaja, dan pemberian makanan tambahan pada bayi usia diatas 6 bulan,

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Implementasi Program Pencegahan *Stunting* Di UPTD Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu persoalan masalah yang akan menjadi suatu fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Implementasi Program Pencegahan *Stunting* Di UPTD Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap Implementasi Program Pencegahan *Stunting* Di UPTD Sei Lekop Kabupaten Bintan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menambah wawasan/pengetahuan dalam Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada mata kuliah kebijakan 7 espon dengan kajian partisipasi masyarakat yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan bagi mahasiswa/i untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan alternative untuk memberikan informasi, bahan referensi, dan sumber informasi awal untuk peneliti-peneliti yang tertarik pada Implementasi Program Pencegahan *Stunting* Di UPTD Puskesmas Sei Lekop Kabupaten Bintan. Untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai bagaimana pemeliharaan pasar tradisional dan menjadi kesempatan untuk dapat menerapkan ilmu yang didapat semasa kuliah.

b. Bagi Organisasi

Penelitian ini dapat memberikan masukan serta rekomendasi bagi Dinas Kesehatan serta *stakeholder* terkait lainnya dalam Penanganan *Stunting*.